

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**RONNY GUNAWAN  
079916069**



K4  
Fs. P. 06/05  
Gun  
k

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
SEMESTER GASAL 2004/2005**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik**



**Disusun Oleh :**

**RONNY GUNAWAN  
079916069**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
SEMESTER GASAL 2004/2005**

**KONFLIK PENATAAN APARATUR PEMERINTAH  
DAERAH**

**( Studi Kasus Konflik Mutasi Lurah di Kelurahan Sidotopo Wetan  
Kecamatan Kenjeran Pemerintah Kota Surabaya )**

**Skripsi ini telah memenuhi persyaratan disetujui untuk diujikan**

**Surabaya, 21 Oktober 2004**

**Dosen Pembimbing**



**Drs. Privatmoko, MA.**  
**NIP. 130 937 952**

**KONFLIK PENATAAN APARATUR PEMERINTAH**  
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
**DAERAH**

( Studi Kasus Konflik Mutasi Lurah di Kelurahan Sidotopo Wetan  
Kecamatan Kenjeran Pemerintah Kota Surabaya )

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan dewan penguji pada :**

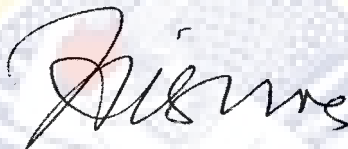
**Hari : Selasa**

**Tanggal : 02 Nopember 2004**

**Pukul : 08.00 WIB**

**Tim Penguji**

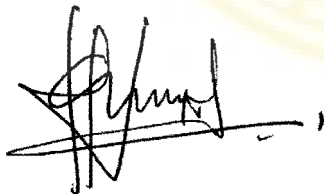
**Ketua Penguji**



**Drs. Wisnu Pramutanto, M.Si**

**NIP. 131 453 124**

**Anggota I**



**Dra. Dwi Windyastuti, M.A**

**NIP. 131 801 643**

**Anggota II**



**Drs. Priyatmoko, M.A.**

**NIP. 130 937 952**

Dengan ditetapkan status sebagai daerah otonomi yang luas disertai dengan desentralisasi yang tinggi sebagaimana dijabarkan di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, setiap daerah Kabupaten atau Kota mempunyai peluang untuk mengembangkan kreasi dan melakukan inovasi dalam mengelola kebutuhan rumah tangganya sendiri.

Dan dalam format seperti ini, kebutuhan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas menjadi dasar pertimbangan utama yang memerlukan langkah-langkah prioritas yang terprogram secara sistematis. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya pun melakukan penataan aparatur pemerintah daerahnya melalui mekanisme eselonisasi dan mutasi yang didasarkan pada PP No. 84 tahun 2000 tentang Perangkat Organisasi Daerah serta PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Kendati demikian, proses tersebut tidak terlepas dari polemik sehingga memicu terjadinya konflik. Banyak pihak yang menentang pelaksanaan mutasi tersebut terutama warga masyarakat di wilayah Kelurahan Sidotopo Wetan. Mereka menolak lurah mereka dimutasikan oleh Pemerintah Kota Surabaya, berbagai cara pun mereka lakukan untuk dapat mencapai tujuan tersebut.

Maka dari itu, skripsi ini membahas secara utuh kronologi konflik, pihak-pihak yang berkonflik dengan ragam kepentingan-kepentingannya, faktor-faktor penyebab munculnya konflik, usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk memenangkan konflik dan solusi konflik. Sehingga, dengan demikian akan dapat diketahui secara jelas gambaran konflik yang telah terjadi, pihak mana yang menang dan kalah dalam konflik tersebut serta akar permasalahan konflik yang masih tersisa yang dapat menjadi pemicu munculnya konflik baru antara warga masyarakat di wilayah Kelurahan Sidotopo Wetan dengan Pemerintah Kota Surabaya.

Di dalam menggali dan menganalisis data, kajian ini mengambil pendekatan kualitatif. Dan teori yang digunakan dalam kajian ini banyak mengadopsi dari teori-teori birokrasi, organisasi modern serta teori konflik.

Beberapa data yang ditemukan dalam kajian ini, meliputi **pertama tentang pihak-pihak yang terlibat** di dalam lingkaran konflik yaitu Lurah Slamet (mantan Lurah Sidotopo Wetan), DPRD Surabaya, PDIP PAC Kenjeran dan FORKOM (Forum Komunikasi) RW Sidotopo Wetan.

**Kedua, tentang faktor-faktor penyebab konflik** adalah kepentingan Lurah Slamet, perbedaan penafsiran PP 84 Tahun 2000 dan PP 100 Tahun 2000, kasus tanah ganjaran, serta keterlibatan PDIP PAC Kenjeran dan Ranting Sidotopo Wetan.

Ketiga, **tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik** untuk memenangkan konflik meliputi : pendekatan kekuasaan, politisasi isu serta praktek politik uang.

Dan yang terakhir adalah **tentang akar permasalahan yang masih tersisa** yang memiliki potensi secara signifikan terhadap munculnya konflik baru antara Pemkot Surabaya dengan warga Sidotopo Wetan, yaitu permasalahan tanah eks-ganjaran.

Konklusinya, proses mutasi lurah yang seharusnya dipandang sebagai sebuah mekanisme yang dilakukan untuk pembinaan karier, peningkatan kemampuan (*skills*), peningkatan motivasi karyawan serta penyegaran organisasi. Realita di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya justru dipakai sebagai instrument perebutan jabatan dan kekuasaan demi kepentingan pribadi dan mempertahankan *status quo* semata.